

Pengaruh Spasial Belanja Desa dalam Menurunkan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat

Sarah Nita Hasibuan^{1*}, Fauji Yamin²,
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, DKI Jakarta, Indonesia¹
Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara, Indonesia²
e-mail: hasibuannita091@gmail.com

ABSTRACT

The Village Fund as fulfillment of the village's right in implementing regional autonomy so that the village can grow and develop based on its potential. The poverty study aims to analyze the effect of village spending (village spending on village governance, village infrastructure development, empowerment and development of village communities) on poverty. This study uses cross-sectional data from 165 villages, with a Geographically Weighted Regression (GWR) model. This study uses cross-sectional data from 165 villages, with a Geographically Weighted Regression (GWR) model. The results of the GWR analysis show that village spending in the field of government administration has no effect on poverty. Village expenditures for physical infrastructure development, community empowerment and development have an effect on reducing poverty.

Keywords: *geographically weighed regression, poverty, village fund*

ABSTRAK

Dana Desa sebagai pemenuhan hak desa dalam melaksanakan otonomi daerah agar dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan potensinya. Studi kemiskinan bertujuan menganalisis pengaruh belanja desa (belanja desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa) terhadap kemiskinan. Studi ini menggunakan data cross-section dari 165 desa, dengan model *Geographically Weighed Regression* (GWR). Hasil analisis GWR menunjukkan belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Belanja desa untuk pembangunan infrastruktur fisik, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat berpengaruh untuk mengurangi kemiskinan.

Kata Kunci: *geographically weighed regression, kemiskinan, belanja desa*

Pendahuluan

Kebijakan pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian melalui kebijakan membangun dari desa termaktub dalam Undang-Undang (UU) No. 6/2014 tentang Desa. Hal ini menandakan telah terjadi pergeseran paradigma pembangunan di daerah terutama perdesaan. Munculnya transfer langsung ke desa dari APBN menandakan meningkatnya kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam menjalankan dan mengelola kekayaan/potensi desanya (Badan Kebijakan Fiskal, 2018). Harapannya desa mandiri secara fiskal dan perekonomian sebagai ujung tombak dari peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan perdesaan sejalan dengan visi besar pemerintah yang mencanangkan Nawacita yang merupakan agenda prioritas pembangunan nasional tahun 2019-2024. Melalui kebijakan tersebut diharapkan mampu membantu desa untuk memperkecil atau menghilangkan kesenjangan, baik kesenjangan antarkelompok maupun kesenjangan antarwilayah dengan prioritas pengurangan jumlah masyarakat miskin di perdesaan. Selain itu, keterkaitan yang kuat antara visi dan misi pemerintah dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 mengantarkan hasil pembangunan desa yang bersifat lebih partisipatif didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 80 Ayat 4 tentang pembangunan desa yang menyebutkan bahwa prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasar tingkat kebutuhan masyarakat desa.

Dana desa pemberian pemerintah pusat, masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaannya, seperti kesulitan dan keterlambatan pemerintah dalam penyusunan anggaran dan perencanaan desa. Hal ini berdampak pada pembangunan desa yang condong pada pembangunan fisik desa (Rusdin, 2021). Diperkuat oleh penelitian Mahfudz, (2009) menyatakan bahwa pengalokasian anggaran dasar dana desa sebagian besar pada pembangunan fisik desa (sarana dan prasarana). Implikasinya, besaran dana yang diterima belum cukup meningkatkan *multiplier effect* untuk masyarakat desa dan dibuktikan dengan masih tingginya tingkat kemiskinan antara perdesaan dan perkotaan (Sunu & Utama, 2019). Data dari Badan Pusat Statistik/BPS (2022) mengemukakan tingkat kemiskinan di daerah perdesaan mencapai 12.36%, sedangkan di wilayah perkotaan 7.53%. Terdapat beberapa penyebab masih tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan, salah satunya keniakan inflasi bahan pangan (Faharuddin *et al.*, 2022; Farandy, 2020), tingkat pendidikan masyarakat yang rendah berimbas pada terbatasnya pekerjaan yang berkualitas (Wicht *et al.*, 2019), penguasaan aset yang rendah, dan masih lemahnya keterkaitan ekonomi, baik secara spasial maupun sektoral (Prawoto *et al.*, 2009).

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya jarak atau kesenjangan antara yang harus dimiliki dengan yang sebenarnya terjadi pada suatu waktu. Todaro, (2006) menyatakan bahwa kemiskinan adalah salah satu indikator mengetahui capaian keberhasilan pembangunan pada suatu daerah. Kabupaten Bandung Barat (KBB) di tahun 2022 memiliki indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang tinggi sebesar 1.62 dan 0.41 poin lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat, yakni sebesar 1.32 dan 0.33 (BPS Jawa Barat, 2023). Dengan kata lain, untuk menurunkan kemiskinan di KBB cenderung lebih sulit dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Tingginya indeks ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius Pemkab Bandung Barat, melalui pengoptimalan dan penggunaan potensi daerah, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari sumber daya alam KBB.

Jika dilihat dari perkembangan dana desa untuk Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2015-2021 mengalami kenaikan yakni 55,48% di tahun 2022 dari penerimaan awal Rp53,10 miliar, sementara tingkat kemiskinan cenderung fluktuatif. Adapun tingkat kemiskinan di tahun 2017 yaitu 11.49% dan di tahun 2021 mengalami penurunan 11.30% (turun 0.19%). Banyak kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah

dalam menurunkan tingkat kemiskinan, namun tingkat kemiskinan masih tinggi, baik di perkotaan maupun perdesaan. Hal ini diduga karena penanggulangan kemiskinan dilakukan secara seragam bagi seluruh wilayah perdesaan (Gusti *et al.*, 2020). Oleh karenanya, perlu dikaji apakah pengaruh dana desa sama saja di semua desa dalam satu wilayah kabupaten, atau pengaruhnya berbeda secara spasial karena karakteristik desanya berbeda menurut lokasi (Harmes *et al.*, 2017; Hasibuan *et al.*, 2019).

Hasibuan *et al.*, (2019) juga sudah memetakan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat dalam empat klaster atau pola kemiskinan, yaitu: (1) desa yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, dikelilingi desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi juga, (2) desa dengan tingkat kemiskinan rendah, dikelilingi desa-desa dengan tingkat kemiskinan rendah juga, (3) desa dengan tingkat kemiskinan tinggi, tapi dikelilingi desa-desa dengan tingkat kemiskinan rendah, dan (4) desa dengan tingkat kemiskinan rendah, tapi dikelilingi desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Penelitian pengaruh dana desa sudah banyak dilakukan, namun sangat jarang mengaitkannya dengan aspek spasial yang pengaruhnya dapat berbeda terhadap tingkat kemiskinan di desa. Keterkaitan spasial juga akan mempermudah dalam proses pengambilan kebijakan khususnya ditingkat desa. Kajian ini mencoba melihat ragam pengaruh dana desa dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan kajian ini, selain itu berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Jo. PP No. 22/2015 Tentang Dana Desa mengatur penggunaan dana desa berdasarkan empat bidang, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan (infrastruktur fisik) desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta pembinaan kemasyarakatan desa, sehingga sangat tepat penelitian ini melihat dari sisi belanja desa sesuai amanat PP tersebut.

Dari sisi teori, penelitian ini akan memperkaya khasanah pengetahuan, sebab penelitian tentang alokasi belanja desa sesuai dengan amanat UU Desa masih sangat jarang dilakukan. Penelitian selama ini masih berfokus pada alokasi dana desa, bukan dari sisi belanja desa. Berdasarkan peraturan tersebut sangat penting dikaji apakah alokasi belanja desa sudah efektif digunakan di Kabupaten Bandung Barat. Jadi, rumusan masalah dalam penelitian ini mengkaji bagaimana pengaruh spasial belanja desa dalam menurunkan kemiskinan desa di Kabupaten Bandung Barat?

Metode Penelitian

Kabupaten Bandung Barat dipilih secara *purposive* sebagai lokasi pada penelitian ini dengan beberapa pertimbangan. Kabupaten Bandung Barat memiliki capaian indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan salah satu yang tertinggi di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS provinsi dan kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bappeda Kabupaten Bandung Barat. Adapun data yang dibutuhkan untuk menunjang kajian ini adalah persentase penduduk miskin, belanja

desa untuk bidang penyelenggaraan pemerintah, belanja desa untuk pembangunan fisik desa, belanja desa untuk pemberdayaan masyarakat, dan belanja desa untuk pembinaan masyarakat desa. Periode data yang digunakan adalah data tahun 2018 dan 2019 pada variabel yang diteliti.

Untuk menjawab tujuan penelitian, digunakan pendekatan model *Geographical Weight Regression* (GWR) karena ada dependensi (korelasi) dan heteroskedastisitas spasial (Juanda, 2016). Pemilihan model GWR adalah metode ini mampu menjawab dan melihat pengaruh spasial masing-masing variabel pada setiap desa. Selain itu kondisi suatu desa akan sangat berbeda dengan desa lainnya, tetapi memiliki hubungan yang erat dengan desa yang berdekatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Tobler, 1975) bahwa semua yang saling berdekatan satu dengan yang lain, akan tetapi sesuatu yang lebih dekat akan lebih berkaitan dibanding yang berjauhan.

Model GWR adalah pengembangan model regresi linier untuk memodelkan data melalui variabel respons dengan mempertimbangkan aspek data spasial/lokasi. Menurut Fotheringham *et al.*, (2002), model GWR merupakan merupakan model regresi global yang diubah menjadi regresi yang terboboti. Model GWR juga pada dasarnya model regresi sederhana biasa yang ide dasarnya merupakan dari regresi non-parametrik. Model ini lebih mempertimbangkan faktor lokasional dan merupakan model regresi linier lokal yang menghasilkan penduga parameter model yang bersifat lokal dalam setiap pengamatannya. Matriks pembobot pada model GWR besarnya bergantung terhadap kedekatan lokasi amatan. Secara umum, rumus GWR sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0(u_i, v_i) + \sum_{k=1} \beta_k(u_i, v_i) X_{ik} + \varepsilon_i, \quad (1)$$

dimana Y_i adalah nilai observasi variabel respons ke- i ; X_{ik} merupakan nilai observasi prediktor k pada pengamatan ke- i ; β_0 ialah intersep; β_k adalah koefisien regresi; u_i adalah titik koordinat spasial *longitude* pada pengamatan ke- i ; v_i adalah titik koordinat spasial *latitude* pada pengamatan ke- i ; dan ε_i adalah eror ke- i . Terdapat hal yang harus diperhatikan yaitu koordinat spasial yaitu latitude dan longitude yang digunakan sebagai pembobotan dalam pembentukan model GWR. Untuk mengidentifikasi pengaruh belanja desa terhadap kemiskinan, variabel dependen yang dipakai yaitu persentase tingkat kemiskinan, sedangkan variabel independen menggunakan variabel belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah desa (X_1), belanja desa bidang pembangunan fisik (X_2), belanja desa untuk pembinaan (X_3), dan belanja desa untuk pemberdayaan masyarakat desa (X_4). Berikut model GWR untuk menjawab tujuan pada penelitian ini:

$$kemiiskinan_i = \beta_0(u_i, v_i) + \beta_1(u_i, v_i) X_{1i} + \beta_2(u_i, v_i) X_{2i} + \beta_3(u_i, v_i) X_{3i} + \beta_4(u_i, v_i) X_{4i} + \varepsilon_i \quad (2)$$

dengan $kemiiskinan_i$ adalah persentase penduduk miskin desa ke- i (%); u_i adalah titik koordinat spasial *longitude* pada pengamatan ke- i ; v_i adalah titik koordinat spasial *latitude* pada

pengamatan ke- i ; X_1 adalah belanja desa untuk penyelenggaraan pemerintah per kapita pada desa ke- i (rupiah/jiwa); X_2 adalah belanja desa untuk pembangunan fisik per kapita desa ke- i (rupiah/jiwa); X_3 adalah belanja desa untuk pemberdayaan masyarakat per kapita pada desa ke- i (rupiah/jiwa); dan X_4 adalah belanja desa pembinaan masyarakat per kapita pada desa ke- i , (rupiah/jiwa); b_0 adalah intersep; b_1, \dots, b_n adalah koefisien peubah masing-masing lokasi ke- i ; adalah ε_i adalah eror.

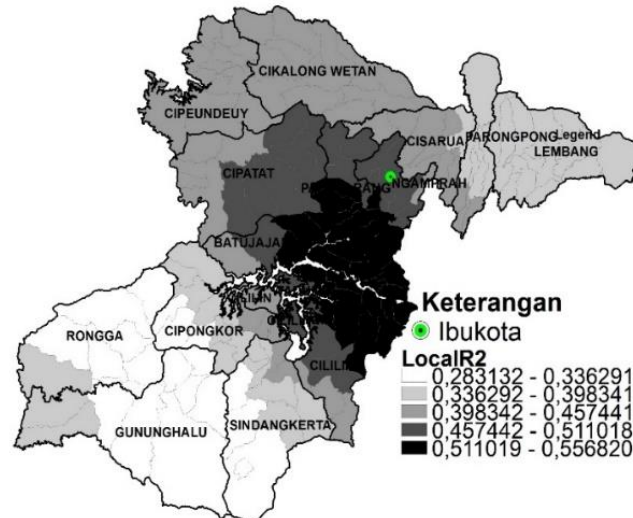
Langkah-langkah dalam pemodelan GWR dimulai dengan pembobotan spasial. Pemilihan pembobotan spasial digunakan untuk pendugaan parameter sangat penting. Matriks pembobot pada GWR berdasarkan pada kedekatan desa pengamatan ke- i dengan titik desa pengamatan lainnya. Semakin dekat jarak, maka nilai bobotnya semakin besar. Misalkan, hubungan antardua desa yang secara geografis berdekatan didefinisikan $W_{ij}=1$, sedangkan geografis yang berjauhan, maka didefinisikan $W_{ij}=0$. Langkah selanjutnya adalah memilih *bandwidth*. Ukuran jarak antarlokasi penelitian terhadap lokasi lain dihitung dalam fungsi pembobotan. *Bandwidth* yang merupakan sebuah lingkaran dengan radius *bandwidth* dari setiap titik lokasi.

Selanjutnya adalah menguji parameter, dimana setiap variabel X yang terdapat dalam model GWR, dilakukan uji signifikansi (nyata) dengan tujuan mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat pada spesifik desa. Setelah dilakukan uji signifikansi, langkah berikutnya adalah pemetaan hasil uji GWR dengan memvisualisasikan hasil data yang diolah ke dalam sebuah peta dengan tujuan agar lebih mudah dipahami dalam pengambilan suatu kebijakan.

Pembahasan

Hasil estimasi model GWR diperoleh koefisien determinasi (R^2) yakni 28,31-55,68%. Nilai R^2 menunjukkan variasi Y mampu dijelaskan oleh model sebesar 28,31-55,68% artinya variasi kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat mampu dijelaskan oleh variabel belanja desa untuk penyelenggaraan pemerintah desa, belanja desa untuk pelaksanaan pembangunan fisik desa, belanja desa untuk pemberdayaan masyarakat, dan belanja desa untuk pembinaan masyarakat sebesar 28,31-55,68%, sedangkan selebihnya dijelaskan ditentukan oleh variabel lainnya yang tidak masuk ke dalam model. Semakin tinggi R^2 pada masing-masing desa menandakan bahwa variabel yang dimasukkan dalam model mampu menjelaskan kemiskinan di setiap desa (Gambar 1).

Gambar 1. Sebaran Lokal R^2 masing-masing Desa di KBB



Sumber: Hasil Olah Data Penulis, 2022

Hair *et al.*, (2011) mengelompokkan nilai *R square* pada tiga kategori yakni kategori kuat, kategori moderat dan kategori lemah. Nilai *R-square* diatas 0.75 termasuk dalam kategori kuat, nilai *R-square* 0.50-0.74 kategori moderat dan nilai *R-square* dibawah 0.50 termasuk kategori lemah. Berdasarkan hasil olahan data, *R-square* di desa-desa Kabupaten Bandung Barat berada pada kategori moderan dan cenderung rendah. Adapun desa-desa yang memiliki *R-square* sedang (0.50-0.55) yakni Desa Cipatik, Pataruman, Batujajar Barat, Citapen, Selacau, Situwangi, Batujajar Timur, Cihampelas, Cangkorah, Tanjungwangi, Giriasih, Mekamukti, Pengauban, Singajaya, Cimerang, Cipeundeuy, Mekarjaya, Bojonghaleuang, Karangtanjung, Laksanamekar, Cikande, Cililin, Kertajaya, Jayamekar, Kidangpananjung, Girimukti, Cimareme, Padalarang, Budiharja, Gadobangkong, Tanjungjaya, Margajaya, Kertamulya, dan Gunungmasigit.

Sementara desa-desa yang memiliki *R-Square* rendah (dibawah 0.50) Yakni Desa Ciburuy, Batulayang, Cipangeran, Citatah, Sukatani, Mekarsari, Tanimulya, Jati, Ngamprah, Cilame, Cirawamekar, Bongas, Mukapayung, Cempakamekar, Bojongkoneng, Tagogapu, Cipatat, Nyalindung, Cimanggu, Ciptaharja, Sumurbandung, Karanganyar, Mekarjaya, Sadangmekar, Pakuhaji, Mandalasari, Kertamukti, Cicangkang Hilir, Pasirhalang, Saguling, Sirnaraja, Ciroyom, Nanggerang, Mandalamukti, Kanangasari, Sukamulya, Puteran, Sirnagalih, Ciptagumati, Rancapanggung, Cipada, Cikalong, Tenjolaut, Sariwangi, Rende, Cisomang Barat, Ciharashas, Wangunjaya, Karyamukti, Margalaksana, Sukahaji, Sindangkerta, Cipada, Ganjarsari, Jatimekar, Cipeundeuy, Rajamandala Kulon, Bojongmekar, Nyenang, Citalem, Nanggaleng, Cihanjuang, Pasirlangu, Padaasih, Ciwaruga, Sarimukti, Jambudipa, Cikadu, Mandalasari, Mandalawangi, Tugumukti, Margaluyu, Mekarsari, Pasirpogor, Buninagara, Cintakarya, Cihanjuang Rahayu, Cigugur Girang, Suntenjaya, Baranangsiang, Kertawangi, Cijenuk, Puncaksari, Sindangjaya,

Cilangari, Ranca Senggang, Cihideung, Karyawangi, Wangunsari, Sarinagen, Gudangkahuripan, Neglasari, Sukajaya, Wangunharja, Cikidang, Cibodas, Pagerwangi, Cikahuripan, Sukamanah, Lembang, Mekarwangi, Jayagiri, Cijambu, Cikole,, Kayuambon, Cibogo, Langensari, Sirnagalih, Wangunsari, Girimukti, Cicangkang Girang, Karangsari, Bojong, Bunijaya, Sukasari, Cibenda, Cintaasih, Sirnajaya, Weninggalih, Cibitung, Cibedug, Celak, Bojongsalam, Tamanjaya, Wargasaluyu, Mekarwangi, Gununghalu, Cicadas, Cinengah, dan Sukaresmi.

Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan model GWR diperoleh model permasamaan pada masing-masing desa sesuai dengan banyaknya desa. Adapun jumlah desa ada di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 165 desa, maka akan diperoleh 165 persamaan model GWR. Berikut adalah contoh model GWR Desa Mekarwagi Kecamatan Sindangkerta dilihat pada persamaan 3:

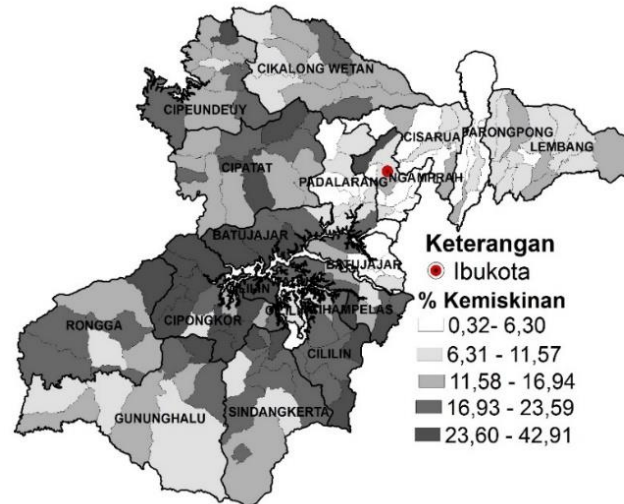
$$\text{kemiskinan} = 0,3353 + 0,2447 X_1 + 0,1671 X_2 + 0,0006 X_3 - 0,1404 X_4 \quad (3)$$

Analisis Pemetaan Tematik Tingkat Kemiskinan

Pemetaan tingkat kemiskinan dilakukan untuk mengetahui sebaran kemiskinan yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2018 sebesar 190.890 penduduk atau 11,49%. Kabupaten Bandung Barat merupakan kabupaten dengan indeks kedalaman dan kemiskinan paling tinggi di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Gambar 2, terdapat pengelompokan tingkat kemiskinan desa dengan variasi tingkat kemiskinan yang berbeda, dengan tingkat kemiskinan antardesa dari yang rendah sampai yang tertinggi. Tingkat kemiskinan terendah sebesar 0,32-6,30% berada pada wilayah Kecamatan Cisarua, Parompong, Padalarang, dan Ngamprah. Wilayah dengan kemiskinan rendah ini terletak pada bagian timur Kabupaten Bandung Barat. Wilayah ini merupakan wilayah yang memiliki akses yang mudah, dan merupakan daerah ibukota Kabupaten Bandung Barat, dan sebagian besar sektor yang berkembang adalah sektor industri. Berbeda halnya dengan desa kemiskinan tinggi, aksesibilitas wilayah ini relatif lebih sulit, jauh dengan ibukota kabupaten dan sektor yang berkembang pada daerah ini adalah sektor pertanian (Hasibuan *et al.*,2019). Tingkat kemiskinan tinggi yakni berkisar antara 16,93-42,91% dengan tingkat kemiskinan ini terkonsentrasi di Kecamatan Cipongkor, Batujajar, Cililin, Ronggam Cihampelas, Sindangkerta, dan sebagian wilayah Cipatat. Makin pekat warna menandakan bahwa tingkat kemiskinan semakin tinggi.

Gambar 2. Peta Sebaran Tingkat Kemiskinan Desa di Kabupaten Bandung Barat



Sumber: Hasil Olah Data Penulis, 2022

Desa yang masuk dalam kategori kemiskinan yang tinggi umumnya terkendala beberapa hal yakni jarak/lokasi, dimana desa-desa ini memiliki jarak yang cukup jauh dengan ibukota kabupaten karena merupakan wilayah suburban. Implikasinya, terlambatnya interaksi ekonomi karena membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama dan masyarakat tidak mempunyai jalan alternatif untuk memasarkan hasil produknya agar lebih cepat. Dengan demikian penurunan kemiskinan semestinya diprioritaskan pada wilayah-wilayah tersebut.

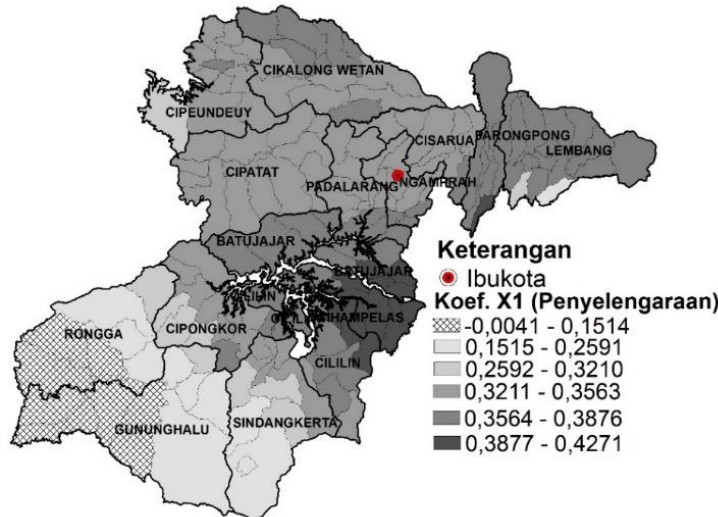
Secara umum tantangan penurunan kemiskinan di Kab Bandung Barat memerlukan penanganan yang holistik dan terintegrasi, diantaranya peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur dan juga memberikan ruang bagi tumbuhnya ekonomi masyarakat, khususnya UMKM. Disini lain pemerintah daerah juga perlu memastikan realisasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan bagi masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam mitigasi dan penurunan kemiskinan.

Pengaruh Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintah terhadap Kemiskinan

Belanja desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa difokuskan pada kegiatan/aktivitas desa yang bersifat administratif, seperti pelayanan/operasional kantor, administrasi kependudukan diantaranya penetapan dan penegasan batas desa, menyusun tata ruang desa, pengadaan musyawarah desa, pengelolaan data dan informasi desa, perencanaan dan evaluasi tingkat perkembangan desa, kerja sama desa, dan pembangunan sarana dan prasarana kantor desa. Hasil uji menggunakan GWR (Gambar 3), terlihat bahwa belanja desa pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa belum efektif dalam penurunan kemiskinan. Hal ini ditandai dengan koefisien positif yang didapatkan, artinya makin besar dana untuk

penyelenggaraan pemerintah, maka akan meningkatkan kemiskinan. Hal ini dikarenakan karena prioritas belanja ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan desa yang bersifat administrasi, misalnya penetapan batas desa, pengelolaan data, dan informasi desa.

Gambar 3. Pengaruh Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintah terhadap Kemiskinan



Sumber: Hasil Olah Data Penulis, 2022

Berdasarkan hasil uji signifikansi, belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Sebagian besar tidak memengaruhi tingkat kemiskinan pada masing-masing desa. Terdapat hal menarik, dimana belanja desa yang tinggi untuk penyelenggaraan pemerintah desa cenderung dilakukan desa yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Hal ini menandakan bahwa kapasitas pemerintah desa masih lemah dan belum mampu membagi penggunaan belanja desa kepada program/kegiatan desa yang prioritas. Padahal belanja desa untuk penyelenggaraan desa ditetapkan maksimal 30% dari total belanja desa. Hasil ini sejalan dengan studi Lantu *et al.*, (2017); yang mengemukakan bahwa dana desa bidang penyelenggaraan desa, tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, lantaran dana digunakan untuk operasional kantor desa.

Adapun belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah yang memiliki pengaruh terhadap kemiskinan yakni Desa Mekarwangi, Weninggalih, Cicadas, Cibedug, Sukamanah, Bojong, Bojongsalam, Cinenga, Sukaresmi, Cikole, Cikidang, Wangunharja, Cibodas, Suntenjaya, Cilangari, Sindangjaya, Bunijaya, Sirnajaya, Gununghalu, Celak, Wargasaluyu, dan Tamanjaya sedangkan 143 desa lainnya tidak berpengaruh terhadap Tingkat kemiskinan.

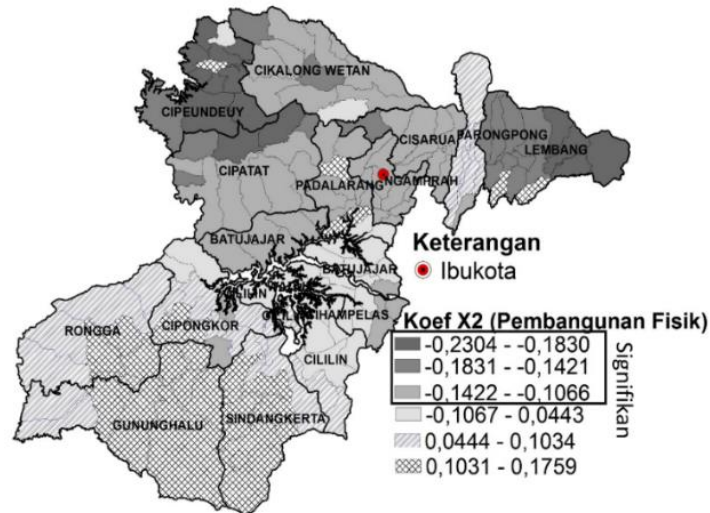
Pengaruh Belanja Desa untuk Pembangunan Fisik Desa terhadap Kemiskinan

Hasil uji signifikansi pengaruh belanja desa untuk pembangunan desa terhadap kemiskinan pada setiap desa di Kabupaten Bandung Barat dengan taraf kepercayaan 95% dan 90% menunjukkan hasil yang bervariasi setiap desa (Gambar 4). Pada taraf nyata 0,05 pengaruh belanja desa untuk pembangunan desa didapatkan hasil bahwa sebanyak 44 desa signifikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, yaitu Desa Cipeundeuy, Kertajaya, Jayamekar, Padalarang, Kertamulya, Tagogapu, Jati, Cempakamekar, Pakuhaji, Margajaya, Mekarsari, Ngamprah, Sukatani, Cimanggu, Bojongkoneng, Cibodas, Gunungmasigit, Kanangasari, Mandalasari, Cipatik, Ganjarsari, Citapen, Pataruman, Bojonghaleuang, Cikande, Cipageran, Girimukti, Saguling, Jambudipa, Padaasih, Kertawangi, Tugumukti, Pasirlangu, Cipada, Cilame, Ciwaruga, Cimareme, Gadobangkong, Tanimulya, Pasirhalang, Mekarjaya, dan Ciburuy.

Pada taraf nyata 0,1 diperoleh hasil sebanyak 40 desa signifikan memengaruhi belanja desa untuk pembangunan terhadap kemiskinan, yaitu Desa Sarimukti, Jayagiri, Sukajaya, Sandangmekar, Kertawangi, Mandalamukti, Ciptagumati, Ciwaramekar, Nyalindung, Sumurbandung, Kertamukti, Mandalasari, Mandalawangi, Margaluyu, Nanggaleng, Sirnaraja, Jatimekar, Bojongmekar, Nyenang, Cipeundeuy, Margalaksana, Sukahaji, Ciharashas, Sirnagalih, Ciroyom, Rajamandalakulon, Ciptaharja, Cipatat, Citatah, Gudangkahuripan, Wangunsari, Pagerwangi, Mekarwangi, Langensari, Kayuambon, Lembang, Cikhuripan, Cibogo, Cikole, Cikidang, Wangunharja, dan Cibodas.

Sementara desa-desa yang tidak memiliki pengaruh belanja pembangunan terhadap kemiskinan adalah: Mekarwangi, Weninggalih, Wangunsari, Buninagara, Cikadu, Ranca Senggang, Cintakarya, Cicangkang Girang, Puncaksari, Pasirpogor, Sindangkerta, Cicadas, Cibedug, Sukamanah, Bojong, Bojong salam, Cinengah, Sukaresmi, Cibitung, Cihideung, Cigugur Girang, Sariwangi, Cihanjuang, Cihanjuang Rahayu, Karyawangi, Laksanamekar, Cilangari, Sindangjaya, Bunijaya, Sirnajaya, Gununghalu, Celak, Wargasaluyu, Sukasari, Tamanjaya, Karangasari, Neglasari, Cijambu, Sirnagalih, Karyamukti, Nanggeran, Bongas, Batulayang, Kidangpananjung, Budiharja, Karanganyar, Cikalong, Rende, Puteran, Tenjolaut, Cisomang Barat, Wangunjaya, Singajaya, Tanjungwangi, Citapen, Cihampelas, Mekarmukti, Tanjungjaya, Mekarjaya, Batujajar Barat, Galanggang, Cintaasi, Cibenda, Sukamulya, Citalem, Girimukti, Cijenuk, Sarinagen, Mekarsari, Batujajar Timur, Baranangsiang, Cangkorah, Pangauban, Giriasih, Karangtanjung, Cililin, Cicangkang Hili, Rancapanggung, dan Mukapayung.

Gambar 4. Pengaruh belanja desa untuk pembangunan fisik terhadap kemiskinan



Sumber: Hasil Olah Data Penulis, 2022

Adapun nilai koefisien seluruh desa memiliki nilai negatif dengan nilai terkecil 0,1077, yaitu Desa Cipageran dan nilai terbesar 0,2304, yaitu Desa Suntenjaya. Artinya, jika terjadi peningkatan belanja desa untuk pembangunan desa sebesar satu satuan, maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,1077 sampai 0,2304, *ceteris paribus*. Jika dilihat pada Gambar 4, pengaruh paling besar terdapat pada Kecamatan Lembang dan Cipeundeuy. Padahal besaran dana yang diperoleh daerah ini termasuk dalam kategori rendah. Semakin pekat warnanya, maka pengaruhnya semakin besar dalam menurunkan kemiskinan. Gambar 4 juga menunjukkan bahwa belanja desa untuk pembangunan fisik yang semakin besar menunjukkan pengaruh yang kuat pada desa dengan kemiskinan rendah, sementara desa dengan kemiskinan tinggi cenderung tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Adapun daerah yang masuk kategori ini adalah Kabupaten Bandung Barat bagian selatan, dimana pembangunan di daerah ini relatif lebih lambat dibanding daerah lainnya. Implikasinya pembangunan pada daerah ini belum dapat dirasakan manfaatnya oleh daerah sekitarnya. Hal ini senada dengan penelitian (Artino *et al.*, 2019; Azhari *et al.* 2019; dan Setianingsih, 2017) yang mengemukakan bahwa dana desa bidang pembangunan desa belum mampu menurunkan kemiskinan di Kabupaten Lebak, Lombok Utara, dan Malawi. Sebab penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, irigasi, jembatan, pemeliharaan sarana pendidikan dan kebudayaan, drainase, dan lain-lain belum mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam jangka pendek (Nugraheni & Priyarsono, 2012; dan Aris *et al.*, 2022). Belanja infrastruktur merupakan belanja investasi jangka panjang untuk mendorong kegiatan perekonomian masyarakat sehingga manfaatnya

akan dirasakan dalam waktu yang cukup panjang (Bivens, 2014; ADB, 2012; Reddy, 2015; dan Bivens, 2017).

Pengaruh Belanja Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terhadap Kemiskinan

Belanja desa juga diprioritaskan untuk program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dianggarkan untuk mendanai kegiatan dengan tujuan meningkatkan kapasitas/*skill* masyarakat desa, mengembangkan usaha warga, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu atau kelompok masyarakat desa. Pemberdayaan memiliki makna memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah untuk hidup mandiri terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar.

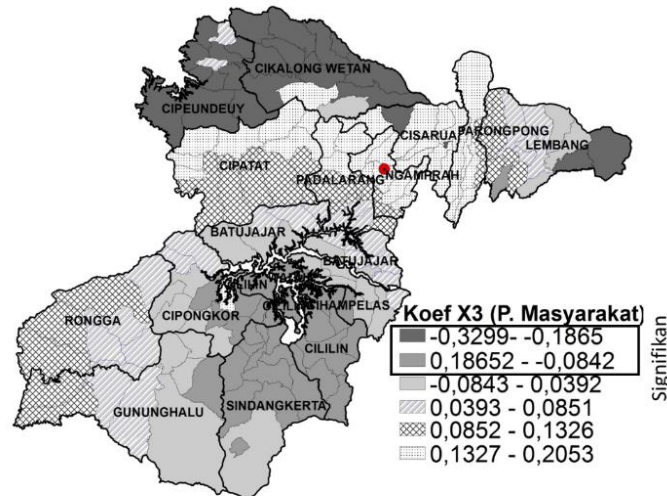
Berdasarkan hasil uji menggunakan GWR pada taraf nyata 0,05 ditemukan pengaruh belanja desa untuk pemberdayaan masyarakat terhadap kemiskinan signifikan pada 51 desa di Kabupaten Bandung Barat, yaitu Desa Weninggalih, Wangunsari, Buninagara, Cikadu, Rancasenggang, Cintakarya, Cicangkang Girang, Puncaksari, Pasirpogor, Sindangkerta, Cibodas, Suntenjaya, Celak, Margaluyu, Nanggaleng, Sirnaraja, Jatimekar, Bojongmekar, Nyenang, Cipeundeuy, Margalaksana, Sukahaji, Ciharashas, Sirnagalih, Ciroyom, Mandalasari, Karyamukti, Nanggerang, Bongas, Batulayang, Kidangpananjung, Budiharja, Karanganyar, Kanagasari, Singajaya, Tanjungjaya, Sukamulya, Citallem, Girimukti, Cijenuk, Saringen, Mekarsari, Karangtanjung, Cililin, Sarimukti, Cicangkang Hilir, Rancapanggung, dan Mukapayung (Gambar 5).

Hasil uji signifikansi pada taraf 0,1 pengaruh belanja desa untuk pemberdayaan masyarakat terhadap kemiskinan hanya terdapat pada 13 desa, yaitu Desa Tagogapu, Cempakamekar, Ciwaramekar, Nyalindung, Sumurbandung, Kertamukti, Mandalawangi, Mandalasari, Cipada, Ganjarsari, Mandalamukti, Ciptagumati, Cikalong, Rende, Puteran, Tenjolaut, Cisomangbarat, Wangunjaya, dan Mekarjaya.

Sementara desa-desa yang tidak memiliki pengaruh belanja pemberdayaan masyarakat terhadap kemiskinan adalah: Mekarwangi, Cicadas, Cibedug, Sukamanah, Bojong, Bojong salam, Cinengah, Sukaresmi, Cibitung, Cihideung, Cigugur Girang, Sariwangi, Cihanjuang, Cihanjuang Rahayu, Karyawang, Laksanamekar, Cipeundeuy, Kertajaya, Jayamekar, Padalarang, Kertamulya, Pakuhaji, Margajaya, Mekarsari, Ngamprah, Sukatani, Cimanggu, Bojongkoneng, Gudangkahuripan, Wangunsari, Pagerwangi, Mekarwangi, Langensari, Kayuambon, Lembang, Cikahuripan, Cibogo, Cikole, Cikidang, Wangunharja, Cilangari, Sindangjaya, Bunijaya, Sirnajaya, Gununghalu, Warga saluyu, Sukasari, Tamanjaya, Karangsari, Neglasari, Cijambu, Sirnagalih, Rajamandala Kulon, Ciptaharja, Cipatat, Citatah, Gunungmasigit, Tanjungwangi, Situwangi, Pataruman, Cipatik, Citapen, Cihampelas, Mekarmukti, Mekarjaya, Batujajar Barat, Galanggang, Bojonghaleuang, Cikande, Girimukti, Cipangeran, Jati, Saguling, Jambudipa, Padaasih, Kertawang, Tugumukti, Pasirlangu, Cipada, Sadangmekar, Cintaasih, Cibenda, Cilame, Ciwaruga,

Jayagiri, Sukajaya, Cimareme, Batujajar Timur, Gadobangkong, Tanimulya, Pasirhalang, Baranangsiang, Cangkorah, Pangauban, Giriasih, Selacau, Cimerang dan Ciburuy.

Gambar 5. Pengaruh Belanja Desa untuk Pemberdayaan terhadap Kemiskinan



Sumber: Hasil Olah Data Penulis, 2022

Adapun angka koefisien memiliki hubungan negatif dengan nilai yang paling kecil adalah 0,08414, yaitu Desa Tanjungjaya dan yang paling tinggi adalah 0,26622, yaitu Desa Tenjolaut. Artinya penambahan belanja desa untuk pemberdayaan masyarakat sebesar satu satuan, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,08414-0,26622, *ceteris paribus*. Belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat memiliki pengaruh yang relatif besar dalam menurunkan kemiskinan pada daerah-daerah dengan kemiskinan tinggi (Gambar 5) sehingga pengoptimalan dana desa pada bidang ini akan mampu menurunkan kemiskinan. Kegiatan pemberdayaan desa melalui alokasi belanja desa dapat dilakukan melalui program dan kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM di desa, menumbuhkan minat berwirausaha masyarakat desa, pengembangan potensi lokal desa guna menghasilkan produk yang bernilai tambah dan menudukung desa dalam menurunkan tingkat kemiskinan (Aris *et al.*, 2022; Hasan *et al.*, 2022 dan Rahmah & Rifka, 2018).

Desa-desanya yang tidak signifikan adalah karena sebagian besar kegiatan pemberdayaannya berupa kegiatan dan pelatihan perangkat desa, kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat, peningkatan kelompok tani dan nelayan, kegiatan promosi desa, dan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat sehingga belum terlihat dampaknya dan dana yang dialokasikan untuk bidang pemberdayaan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan wilayah yang signifikan (Aris *et al.*, 2022; dan). Sedangkan pada wilayah-wilayah yang signifikan, kegiatan pemberdayaan diarahkan pada sektor ekonomi, seperti pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hasil studi juga menunjukkan, belanja desa untuk pemberdayaan masyarakat sebaiknya dibuat beragam tidak hanya difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang kurang menambah nilai ekonomi (Puspitawati *et al.*, 2021; dan Cristina, 2020), tetapi dibuat kegiatan pemberdayaan lain yang mampu mengembangkan kreativitas masyarakat lokal, terutama bagi masyarakat yang dekat dengan pusat industri dan perdagangan. Selain itu, diperlukan sinergi antara pihak pemerintah daerah, swasta (pengusaha) dan masyarakat agar program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan, diminati, serta menciptakan peluang usaha potensial/baru yang dapat mengakselerasi ekonomi masyarakat desa di KBB.

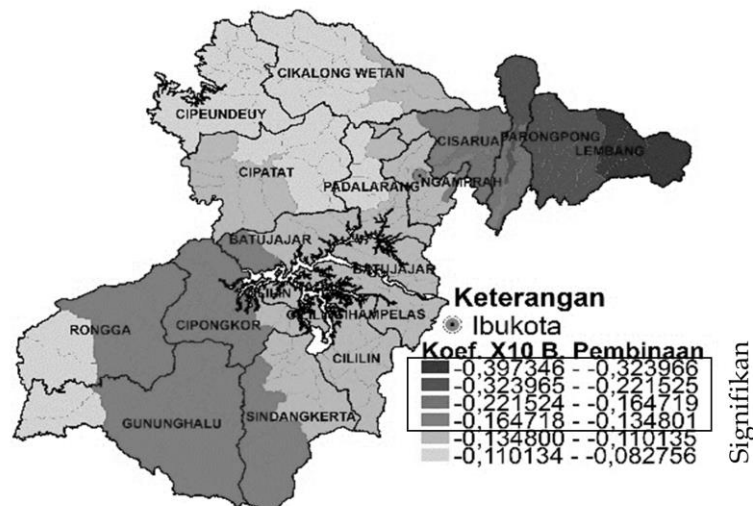
Pengaruh Belanja Desa Bidang Pembinaan Masyarakat terhadap Kemiskinan

Pembinaan masyarakat desa merupakan salah satu program dari pemerintah untuk peningkatan, pengelolaan lembaga dan SDM agar menjadi lebih baik dan mampu bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan ini berupa pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olah raga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan kegiatan lain sesuai kondisi desa.

Berdasarkan hasil uji menggunakan model GWR pada taraf nyata 0,1 menunjukkan bahwa belanja desa untuk pembinaan masyarakat memiliki pengaruh terhadap kemiskinan pada 83 desa di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana yang terlihat pada Gambar 6. Desa-desa yang signifikan adalah Desa Cikadu, Rancasenggang, Cintakarya, Cicangkang Girang, Puncaksari, Pasirpogor, Sindangkerta, Cicadas, Cinengah, Sukaresmi, Sariwangi, Cihanjuang, Laksanamekar, Cipeundeuy, Kertajaya, Jayamekar, Padalarang, Kertamulya, Tagogapu, Cempakamekar, Pakuhaji, Margajaya, Mekarsari, Ngamprah, Sukatani, Cimanggu, Bojongkoneng, Mekarwangi, Langensari, Cikole, Cikidang, Wangunharja, Cibodas, Sukasari, Tamanjaya, Neglasari, Karangasari, Rajamandala Kulon, Ciptaharja, Cipatat, Citatah, Cilame, Gunungmasigit, Ciwaramekar, Nyalindung, Mandalawangi, Mandalamukti, Karanganyar, Tanjungjaya, Mekarjaya, Batujajarbarat, Galanggang, Cipada, Bojonghaleluang, Cikande, Girimukti, Cipageran, Jati, Jambudipa, Padaasih, Pasirlangu, Sadangmekar, Ciwaruga, Sukamulya, Citalem, Girimukti, Cijenuk, Mekarsari, Batujajar Timur, Gadobangkong, Tanimulya, Pasirhalang, Mekarjaya, Cangkorah, Pangauban, Giriasih, Selacau, Karangtanjung, Cililin, Sarimukti, Cimerang, Ciburuy, dan Cicangkang Hilir. Desa-desa yang signifikan pengaruh dana desa bidang pembinaan masyarakat terhadap kemiskinan pada taraf nyata 0,05 adalah sebanyak 23 desa, yaitu Desa Cibatung, Cihideung, Cigugur Girang, Cihanjuang Rahayu, Karyawang, Lembang, Gudangkahuripan, Wangunsari, Pagerwangi, Kayuambon, Cibogo, Cikahuripan, Cijambu, Sirnagalih, Saguling, Kertawang, Tugumukti, Cintaasih, Cibenda, Jayagiri, Sukajaya, Saringen, dan Baranngsiang. Sebanyak 59 desa tidak signifikan pengaruh dana desa bidang pembinaan masyarakat terhadap kemiskinan.

Sementara desa-desa yang tidak memiliki pengaruh belanja pembinaan masyarakat terhadap kemiskinan adalah: Mekarwangi, Weninggalih, Wangunsari, Buninagara, Cibedug, Sukamanah, Bojong, Bojongsalam, Suntenjaya, Cilangari, Sindangjaya, Bunijaya, Sirnajaya, Gununghalu, Celak, Wargaaluyu, Margaluyu, Nanggaleng, Sirnaraja, Jatimekar, Bojongmekar, Nyenang, Cipeundeuy, Margalaksana, Sukahaji, Ciharashas, Sirnagalih, Ciroyom, Nyalindung, Sumurbandung, Kertamukti, Karyamukti, Nanggerang, Bongas, Batulayang, Kidangpananjung, Budiharja, Kanangasari, Mandalasari, Cipada, Ganjarsari, Mandalamukti, Ciptagumati, Cikalong, Rende, Puteran, Tenjolaut, Cisomang Barat, Wangunjaya, Singajaya, Tanjungwangi, Situwangi, Pataruman, Cipatik, Citapen, Cihampelas, Mekarmukti, Rancapanggung, dan Mukapayung.

Gambar 6. Pengaruh Belanja Desa untuk Pembinaan Masyarakat terhadap Kemsikinan



Angka koefisien dana desa bidang pemberdayaan masyarakat bernilai negatif dengan angka minimum sebesar 0,1019, yaitu Desa Cempakamekar dan paling besar adalah 0,3398, yaitu Desa Cibodas, Kecamatan Lembang. Hal ini berarti setiap penambahan dana di bidang pemberdayaan masyarakat sebesar satu satuan, maka mampu menurunkan kemiskinan sebesar 0,1019 sampai 0,3398, *ceteris paribus*. Berdasarkan hasil GWR juga menunjukkan bahwa belanja desa untuk pembinaan masyarakat efektif dalam menurunkan kemiskinan (63,54%), meski beberapa daerah yang belum signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan wilayahnya. Hal ini mungkin saja terjadi karena pada desa-desa tersebut tidak mengalokasikan belanja untuk bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan walaupun ada persentase jumlahnya sangat kecil. Penelitian Setianingsih, (2017) mengemukakan bahwa belanja desa untuk pembinaan masyarakat tidak berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan lantaran belum menjadi prioritas daerah. Implikasinya masih banyak daerah yang tidak mengalokasikan dana desa untuk program pembinaan masyarakat.

Kesimpulan

Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa pengaruh belanja desa terhadap kemiskinan cukup beragam secara spasial di lokasi amatan. Belanja desa untuk penyelenggaraan pemerintah belum efektif dalam menurunkan kemiskinan, sedangkan belanja desa untuk pembangunan (infrastruktur fisik) desa, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat berpengaruh signifikan menurunkan kemiskinan. Adapun belanja desa yang paling besar pengaruhnya terhadap kemiskinan adalah belanja desa untuk pembinaan masyarakat desa, disusul belanja desa untuk pembangunan infrastruktur dan belanja desa untuk pemberdayaan masyarakat. Disisi lain Pengaruh spasial yang berbeda-beda menunjukkan bahwa pola belanja desa berbeda di setiap desa, sehingga kebijakan dana desa juga mestinya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Hasil ini juga menunjukkan bahwa aspek spasial tidak dapat diabaikan dalam pembangunan daerah.

Disisi lain, untuk meningkatkan efektivitas belanja desa dalam menurunkan kemiskinan diperlukan koordinasi Lembaga supra desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda) dengan aparat desa. Koordinasi ini bertujuan untuk memberikan arahan dan monev terkait belanja desa yang sesuai dengan lokasi atau karakteristik masing-masing desa. Pemanfaatan belanja desa untuk pemberdayaan masyarakat sebaiknya lebih ditekankan pada pengembangan ekonomi lokal sehingga lebih bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sementara itu, pemanfaatan belanja desa untuk pembinaan masyarakat sudah cukup efektif menurunkan kemiskinan.

Daftar Pustaka

- ADB. (2012). Infrastructure for Supporting Inclusive Growth and Poverty Reduction in Asia. In *Asia Development Bank, Manila, Philippines*. www.adb.org
- Aris, M. F., Marseto, & Sishadiyati. (2022). ANALISIS EKONOMI KEBIJAKAN DANA DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEMISKINAN DESA DI KABUPATEN SIDOARJO. 2(2), 8–15.
- Artino, A., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2019). The Relationship of Village Funds to Poverty. *Tataloka*, 21(3), 381–389.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2018). *Kajian dana desa Analisis empiris badan usaha milik desa, kesempatan kerja, infrastuktur pada seribu desa di Indonesia*. https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2019/kajian/Kajian_dana_desa.pdf
- Bivens, J. (2014). The Short- and Long-Term Impact of Infrastructure Investments on Employment and Economic Activity in the U.S. Economy. *Economic Policy Institute*, 64. <http://www.epi.org/publication/impact-of-infrastructure-investments/>
- Bivens, J. (2017). The potential macroeconomic benefits from increasing infrastructure investment. *Economic Policy Institute, Washington DC, July*, 18. <https://files.epi.org/pdf/130111.pdf>

- Cristina, H. M. (2020). Community Empowerment Program To Increase Community Income in Sitimulyo Village, Piyungan District, Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 21(2), 128–134. <https://doi.org/10.23917/humaniora.v21i2.9222>
- Faharuddin, F., Yamin, M., Mulyana, A., & Yunita, Y. (2022). Impact of food price increases on poverty in Indonesia: empirical evidence from cross-sectional data. *Journal of Asian Business and Economic Studies*. <https://doi.org/10.1108/jabes-06-2021-0066>
- Farandy, A. R. (2020). Analyzing Factors Affecting Indonesian Food Price Inflation. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 28(1), 65–76. <https://doi.org/10.14203/jep.28.1.2020.65-76>
- Fotheringham, A. S., Brunsdon, C., & Charlton, M. (2002). *Geographically Weighted Regression: the analysis of spatially varying relation* (Vol. 21, Issue 1). John Wiley & Sons. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Gusti, Y., Agustar, A., & Osmet. (2020). Pemanfaatan Dana Desa dan Kaitannya dengan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 265–285.
- Hair, J., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (2011). *MULTivariate Data Analysis Fifth Edision*.
- Harmes, H., Juanda, B., Rustiadi, E., & Barus, B. (2017). Pemetaan Efek Spasial pada Data Kemiskinan Kota Bengkulu. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(2), 192. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.2.192-201>
- Hasan, A., Amin, C., & Kotih, M. (2022). EFEKTIVITAS DANA DESA TERHADAP JUMLAH KEMISKINAN DI KECAMATAN OBA KOTA TIDORE KEPULAUAN. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, XIII(2), 39–67.
- Hasibuan, S. N., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2019). Analisis Sebaran Dan Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 7(2), 79–91. <https://doi.org/10.29244/jai.2019.7.2.79-91>
- Juanda, B. (2016). Permodelan Ekonometrika Spasial dengan Geographical Weighted Regression (GWR). In *Ayan* (Vol. 8, Issue 5, p. 55). <https://bbjuanda.files.wordpress.com/2010/10/gwrmodel.pdf>
- Lantu, Y. S. M., Koleangan, R. A. M., & Rotinsulu, T. O. (2017). Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(5), 1–19. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/15785/15296>
- Mahfudz, M. (2009). Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 5(1). <https://doi.org/10.33830/jom.v5i1.199.2009>
- Nugraheni, D., & Priyarsono, D. S. (2012). Local Financial Performance , Infrastructure , and Poverty : An Analysis of Districts / Municipalities in Indonesia 2006 – 2009. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 12(2), 148–167.
- Prawoto, N., Ekonomi, F., Muhammadiyah, U., Jalan, Y., & Selatan, L. (2009). Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(1), 56–68.
- Puspitawati, L., Hertati, L., Gantino, R., & Ilyas, M. (2021). *The Influence of Village Community Empowerment Base on the Creativity of Village Community Groups To Increase Standard of Living in Villages in the Covid-19 Era*. 2(1), 48–68.

- Rahmah, M., & Rifka, M. D. (2018). Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 137–154. <https://doi.org/10.33701/jkp.v1ino.2.1102>
- Reddy, B. S. (2015). Measuring and Evaluating Energy Security and Sustainability : A Case Study of India. *Indira Gandhi Institute of Development Research, April*.
- Rusdin. (2021). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan. *EJournal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman*, 9(3), 249–260.
- Setianingsih, I. (2017). KONTRIBUSI DANA DESA DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN MELAWI. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 5(3), 1–18.
- Sunu, M. K. K., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8, 843–872.
- Tobler, W. R. (1975). *Cellular Geography*. 75–100. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Todaro, M. P. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Negara Dunia Ketiga* (11th ed.). ERLANGGA.
- Wicht, A., Müller, N., Haasler, S., & Nonnenmacher, A. (2019). The interplay between education, skills, and job quality. *Social Inclusion*, 7(3), 254–269. <https://doi.org/10.17645/si.v7i3.2052>